



Upaya Bersama Komunitas Agama dalam Mengatasi Kemiskinan: Panggilan untuk Partisipasi

Andry Saputra Ligawan

Sekolah Tinggi Teologi Aletheia, Lawang, Indonesia
andry.ligawan@sttaletheia.ac.id

Abstract

Poverty has become a critical issue in human life today, and tackling it is not the sole task of the government or institutions outside the religious realm. More than just a social responsibility, the existence of religion is key to actively participating in overcoming the problem of poverty, creating a providence for the creator in this world. To unravel this problem, the author will explore liberation theology as a framework to help religion play its critical role in alleviating poverty. Liberation theology, which grew up in social and economic inequality, offers a solid conceptual foundation to guide religion in poverty reduction efforts. Through this approach, religion is directed to be a voice that champions human rights and social justice and actively contributes to shaping progressive policies. Therefore, religion is a spiritual guide and a moral force that encourages real action. Religious participation in overcoming poverty is fulfilling a social calling and expressing the values of humanity and justice contained in religious teachings. Thus, liberation theology thinking becomes a relevant and essential tool to guide religion in manifesting its mission as an agent of change in defending those marginalized and impoverished. As a result, the joint efforts of religions to overcome poverty are not only a moral obligation but also a concrete manifestation of the commitment to create a more just and empowered world.

Keywords: Liberation Theology, Social Justice, Participation, Religion, Poverty.

Abstrak

Kemiskinan telah menjadi isu kritis dalam kehidupan manusia dewasa ini, dan penanganannya bukanlah tugas semata-mata pemerintah atau lembaga di luar ranah keagamaan. Lebih dari sekadar tanggung jawab sosial, keberadaan agama menjadi kunci untuk berpartisipasi aktif dalam mengatasi masalah kemiskinan, menciptakan sebuah pemeliharaan bagi pencipta dalam dunia ini. Dalam upaya mengurai permasalahan ini, penulis akan menyelami pemikiran teologi pembebasan sebagai kerangka kerja untuk membantu agama memainkan peran kritisnya dalam mengentaskan kemiskinan. Teologi pembebasan, yang tumbuh dalam konteks ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, menawarkan landasan konseptual yang kuat untuk membimbing agama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui pendekatan ini, agama diarahkan untuk menjadi suara yang memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta berkontribusi aktif dalam membentuk kebijakan yang progresif. Oleh karena itu, agama bukan hanya menjadi pemandu rohaniah, melainkan juga kekuatan moral yang mendorong tindakan nyata. Partisipasi agama dalam mengatasi kemiskinan bukan sekadar memenuhi panggilan sosial, tetapi juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam ajaran agama. Dengan demikian,

pemikiran teologi pembebasan menjadi sebuah alat yang relevan dan esensial untuk memandu agama dalam menegawantahkan misinya sebagai agen perubahan dalam membela mereka yang terpinggirkan dan menderita akibat kemiskinan. Sebagai akibatnya, upaya bersama agama untuk mengatasi kemiskinan bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga sebuah manifestasi konkret dari komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berdaya.

Kata kunci: Teologi Pembebasan, Keadilan Sosial, Partisipasi, Agama, Kemiskinan.

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi masalah yang terus berlanjut dan mempengaruhi kehidupan manusia dalam skala global. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan manusia, kemiskinan terus menimpa jutaan orang di seluruh dunia, yang menimbulkan tantangan besar bagi individu, komunitas, dan masyarakat luas. Sifat kemiskinan yang beragam melampaui sekadar kekurangan ekonomi, mencakup akses yang tidak memadai terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar, sehingga menghambat realisasi hak-hak dan martabat manusia yang mendasar. Kemiskinan yang terus berlanjut di era yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, masih adanya kemiskinan menjadi pengingat akan ketidakadilan yang melekat dalam sistem sosio-ekonomi global. (Indro, n.d., 23)

Kemiskinan yang merajalela dalam kehidupan masyarakat tidak hanya mengakibatkan penderitaan individu dan keluarga, tetapi juga memiliki dampak yang merugikan bagi perkembangan bangsa secara keseluruhan. Fadliliah Maulidah dan Ady Soejoto mengungkapkan bahwa kemiskinan dalam sebuah keluarga dapat menjadi penghalang yang signifikan bagi pendidikan anak-anak, memperlambat kemajuan pendidikan yang merupakan fondasi utama pembangunan suatu negara. Pendidikan diakui sebagai instrumen kunci dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Namun, ketika kemiskinan menghantui, akses yang memadai terhadap pendidikan sering kali menjadi barang mewah bagi banyak individu. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali terpaksa menanggung beban yang berat, menghadapi kesulitan dalam memperoleh buku, alat tulis, atau bahkan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah (Maulidah & Soejoto, 2017, 228-9). Syamsul Arifin dan Priyo Utomo menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya menghambat akses anak-anak terhadap pendidikan yang berkualitas, tetapi juga menimbulkan perasaan putus asa dan rasa tidak berdaya yang dapat meredam motivasi mereka dalam meraih prestasi. Lebih lanjut, ketidakmampuan memperoleh pendidikan yang layak memiliki dampak jangka panjang yang merugikan. Tanpa akses yang memadai ke pendidikan, individu cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif, sehingga terus bergantung pada pekerjaan yang minim penghasilan atau bahkan menganggur secara berkelanjutan. (Arifin & Utomo, 2022, 38)

Panggilan untuk aksi kolektif mengatasi kemiskinan membutuhkan upaya bersama dari berbagai kalangan, yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah atau lembaga sosial saja. Meskipun lembaga pemerintah dan organisasi-organisasi sosial memainkan peran penting dalam mengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan yang efektif, upaya memerangi kemiskinan juga beresonansi secara mendalam dengan keyakinan agama dan panggilan moral. Dalam berbagai tradisi agama, menanggulangi kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai tugas suci yang dibebankan kepada para pemeluknya untuk secara aktif terlibat dalam tindakan belas kasih, solidaritas, dan keadilan sosial. Perspektif agama tentang kemiskinan dalam banyak tradisi agama, kemiskinan tidak dilihat hanya sebagai masalah ekonomi tetapi juga sebagai panggilan moral yang mendalam. Kitab suci dan ajaran agama sering kali menekankan pentingnya kepedulian terhadap anggota masyarakat yang terpinggirkan dan rentan, mendorong umatnya untuk menunjukkan belas kasih dan kemurahan hati kepada mereka yang membutuhkan. Dalam ajaran agama Kristen yang didasarkan pada Kisah Para Rasul, ditekankan bahwa para rasul dan orang-orang Kristen yang telah dipenuhi Roh Kudus seharusnya menunjukkan kepedulian sosial. Mereka menggunakan harta milik mereka untuk membantu orang miskin (Kis. 2:44-45; 4:32-37). (Kemenag, n.d.). Dalam Al-Quran dalam QS. Al-Bayyinah 5 "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.", zakat ditekankan sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Muslim yang mampu. (Aljumanto, n.d.). Dalam Sutta Pitaka, terdapat konsep Metta Sutta (Sutta tentang Cinta Kasih). Sutta ini mengajarkan umat Buddha untuk mengembangkan cinta kasih yang universal kepada semua makhluk tanpa kecuali. Cinta kasih ini menjadi dasar bagi belas kasih terhadap sesama, yang mendorong untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan, termasuk kemiskinan. (Karaniya Metta Sutta: *The Buddha's Words on Loving-Kindness*, n.d.). Baik melalui prinsip zakat dalam Islam, konsep kasih dalam Kristen, atau penekanan pada belas kasih dan altruisme dalam Budha, agama-agama menawarkan kerangka kerja etis yang kaya untuk mengatasi kemiskinan dan mempromosikan martabat manusia dan keadilan sosial. (Adnan & Bukido, 2020, 178)

Penelitian ini menyoroti eskalasi tantangan kemiskinan yang semakin menghantui kehidupan masyarakat dewasa ini. Dalam menghadapi situasi yang semakin memprihatinkan ini, diperlukan pendekatan inovatif yang tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah melalui program-program yang sudah ada. Penelitian ini menegaskan perlunya keterlibatan komunitas agama dalam membantu mereka yang mengalami kemiskinan, dengan mengadopsi pemahaman dari teologi pembebasan. Dengan menawarkan paradigma baru, penelitian ini tidak hanya melihat agama sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang mendorong perubahan menuju tercapainya keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini membedakan diri dari penelitian sebelumnya dengan menggabungkan panggilan agama dan teologi

pembebasan sebagai kontribusi dalam mengatasi tantangan kemiskinan yang semakin meningkat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan proses pencarian berbagai sumber literatur baik berupa buku, media, pendapat para ahli, maupun hasil penelitian orang lain. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk merangkai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini. Salah satu sumber referensi yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti sebagai panduan dalam menggali informasi adalah melalui studi buku.S (Snyder, 2019, 334)

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk menjelajahi tema teologi pembebasan serta implikasinya terhadap panggilan agama dalam mengatasi kemiskinan. Fokus utamanya adalah mengkaji secara kritis karya-karya ilmiah yang membahas teologi pembebasan dari berbagai sudut pandang dan mengidentifikasi relevansinya dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Penelusuran ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai kerangka teori yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya untuk memahami dan menjelaskan konsep teologi pembebasan. Selain itu, penelitian ini merinci studi literatur yang menitikberatkan pada peran agama dalam upaya mengatasi kemiskinan, sebagaimana disampaikan oleh Soegiharto bahwa agama memiliki peran sentral dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, dilakukan tinjauan mendalam terhadap literatur yang membahas kontribusi agama-agama tertentu dalam memotivasi dan memberdayakan umatnya untuk aktif berpartisipasi dalam mengurangi kemiskinan. Pendekatan ini membuka jalan bagi penyelidikan lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip-prinsip teologi pembebasan dapat diimplementasikan dalam praktik keagamaan sehari-hari untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. (Soegiharto, 2022)

Pembahasan

Teologi Pembebasan sebagai Landasan Konseptual

Teologi pembebasan muncul dengan latar belakang ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang meluas, terutama yang terjadi pada komunitas-komunitas yang terpinggirkan di seluruh dunia. Teologi pembebasan berkembang di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, terutama di negara-negara yang mengalami ketidakadilan sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa teologi ini relevan dan aktual dalam menghadapi tantangan sosial dan politik di dunia ketiga (Wahab, 2013, 221). Inti dari teologi pembebasan adalah gagasan tentang praksis, perpaduan antara teori dan tindakan, yang menggarisbawahi pentingnya menerjemahkan iman ke dalam upaya-upaya nyata yang bertujuan untuk mentransformasi struktur masyarakat. (Ngabalin, 2017)

Rowland menjelaskan bahwa teologi pembebasan, sebuah aliran pemikiran teologis yang muncul dalam konteks ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, mengemuka sebagai landasan konseptual yang menginspirasi dan membimbing agama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut teologi ini, tujuan utama adalah merdeka dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, dengan memberikan penekanan pada hak asasi manusia dan keadilan sosial sebagai nilai-nilai utama yang harus dijunjung tinggi. Landasan konseptual teologi pembebasan adalah mewujudkan komitmen praktis Kristen melalui dialog antara tradisi Kristen, teori sosial, dan pemahaman terhadap kondisi kaum miskin dan terpinggirkan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong tindakan yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih adil (OFM, 2022). Landasan konseptual

teologi pembebasan memberikan fondasi yang kuat bagi pemikiran agama dalam menanggapi dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Pemahaman akan hak asasi manusia menjadi landasan yang esensial, menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat dan kebebasan setiap individu. Dalam konteks kemiskinan, agama diarahkan untuk aktif berpartisipasi dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan setara. (Rowland, 2007)

Fitrianasari & Badia'h juga menekankan bahwa teologi pembebasan juga menegaskan keadilan sosial sebagai prinsip pokok, mendesak agama untuk bersikap proaktif dalam mengatasi disparitas sosial dan ekonomi. Pandangan ini mendorong agama untuk tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga agen perubahan yang berkontribusi dalam merancang kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, teologi pembebasan memandang agama sebagai kekuatan moral yang harus diterapkan secara aktif dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin dan merespons isu-isu ketidaksetaraan. Melalui pendekatan ini, teologi pembebasan memberikan arahan yang jelas bagi agama untuk melibatkan diri dalam tindakan nyata yang berfokus pada pemberdayaan dan pembebasan masyarakat dari siklus kemiskinan. Oleh karena itu, teologi pembebasan bukan hanya menjadi wacana teologis, tetapi juga instrumen praktis yang dapat membimbing agama dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan sosial yang positif. Dengan memandang kemiskinan sebagai tantangan yang perlu diatasi bersama-sama, agama dapat memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata bagi semua. (Fitrianasari & Badia'h, 2020)

Pada intinya, teologi pembebasan menantang penafsiran konvensional atas doktrin agama, dengan menyatakan bahwa iman harus secara intrinsik terkait dengan keadilan sosial dan pembebasan ("Teologi Pembebasan, Mewujudkan Keadilan Sosial," 2020). Teologi pembebasan mengkritik tatanan sosial-politik yang ada, yang melanggengkan ketidaksetaraan dan marginalisasi, dan mengadvokasi pergeseran paradigma menuju distribusi sumber daya dan kesempatan yang lebih adil. Teologi pembebasan berpendapat bahwa kemiskinan bukan semata-mata akibat dari kegagalan individu, tetapi sering kali merupakan hasil dari ketidakadilan sistemik dan dinamika kekuasaan yang mengakar. Salah satu prinsip utama dari teologi pembebasan adalah pilihan istimewa bagi orang miskin, yang menganjurkan untuk memprioritaskan kebutuhan dan keprihatinan mereka yang terpinggirkan baik dalam refleksi teologis maupun tindakan praktis. Pilihan istimewa ini menantang lembaga-lembaga keagamaan dan para pemeluknya untuk mengorientasikan kembali prioritas mereka untuk melayani anggota masyarakat yang paling rentan, daripada melayani kepentingan segelintir orang yang memiliki hak istimewa. Teologi ini menuntut adanya evaluasi ulang yang radikal terhadap struktur masyarakat dan dinamika kekuasaan untuk memastikan bahwa sumber daya dan kesempatan didistribusikan secara adil. (Jati, n.d.) Dasar-dasar teologis dari teologi pembebasan menemukan resonansi dalam berbagai tradisi keagamaan, melampaui batas-batas Kekristenan untuk mencakup Islam, Yahudi, dan agama-agama lain. Dalam Islam, misalnya, konsep zakat (sedekah wajib) berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan dan mengentaskan kemiskinan, yang mewujudkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan solidaritas (QS Al-Baqarah: 43). Demikian pula, dalam agama Yahudi, gagasan *tikkun olam* (memperbaiki dunia, didasari oleh Taurat 19:18; 22:22) menggarisbawahi tanggung jawab untuk secara aktif terlibat dalam aktivisme sosial dan mengupayakan keadilan. (Jati, n.d.)

Selain itu, teologi pembebasan menekankan pentingnya mobilisasi akar rumput dan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan perubahan yang berarti. Teologi ini mendorong terbentuknya gerakan-gerakan akar rumput dan organisasi-organisasi akar

rumpun yang memperkuat suara-suara kaum marginal dan memobilisasi aksi kolektif menuju transformasi sosial. Dengan memupuk solidaritas dan agensi kolektif, teologi pembebasan memberdayakan individu-individu untuk menantang sistem-sistem yang menindas dan mengadvokasi hak-hak mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, teologi pembebasan telah menyaksikan kebangkitan minat dan relevansinya, terutama dalam menghadapi ketidaksetaraan global dan keresahan sosial yang semakin meningkat. (Wahab, 2013) Pandemi COVID-19, khususnya, telah menyingkapkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan sistemik yang melingkupi masyarakat kita, menggarisbawahi urgensi untuk mengatasi kemiskinan dan pengucilan sosial. Ketika masyarakat bergumul dengan dampak pandemi yang menghancurkan, teologi pembebasan menawarkan sebuah kerangka kerja untuk memahami tantangan-tantangan ini dalam konteks sosial-politik yang lebih luas dan memobilisasi respons kolektif untuk meringankan penderitaan dan mempromosikan keadilan.

Melalui berbagai kajian tersebut, teologi pembebasan tampil sebagai bukti kuat atas pencarian abadi akan keadilan dan pembebasan dalam tradisi-tradisi keagamaan. Teologi ini menantang kita untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta mendorong keterlibatan aktif dalam upaya transformasi sosial. Dengan mengakar dalam prinsip-prinsip keadilan sosial dan solidaritas, teologi pembebasan menawarkan visi yang inspiratif untuk membangun dunia yang lebih adil dan setara bagi semua.

Agama Sebagai Suara Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial

Dalam perspektif teologi pembebasan, agama muncul sebagai suara yang kuat yang memiliki tanggung jawab besar untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Agama melampaui peran tradisionalnya sebagai panduan spiritual belaka, berkembang menjadi kekuatan moral yang mengkatalisasi tindakan nyata dalam memerangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Pendekatan transformatif ini mendefinisikan kembali peran agama, mengilhami agama dengan peran proaktif dalam membentuk masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. (OFM, 2022)

Rohimat & Hakim menjelaskan bahwa inti dari etos teologi pembebasan adalah konsepsi agama sebagai pelopor hak asasi manusia, yang dengan teguh menjaga hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat dari setiap individu. Prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam ajaran agama tidak hanya berada dalam ranah abstrak, tetapi diterjemahkan ke dalam upaya-upaya bersama untuk memperbaiki kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam kerangka ini, agama dipanggil untuk mengambil peran yang beragam-tidak hanya sebagai penasihat moral tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang aktif. Keterlibatan agama dalam upaya penanggulangan kemiskinan melampaui ranah kewajiban sosial; hal ini menjadi perwujudan dari nilai-nilai inti kemanusiaan yang dianut oleh doktrin-doktrin agama. Selain mengadvokasi solidaritas dengan mereka yang rentan dan terpinggirkan, agama juga mendorong para pemeluknya untuk menjadi agen perubahan yang positif di dalam komunitas mereka. Oleh karena itu, upaya-upaya keagamaan yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dianggap sebagai tindakan pengabdian, yang melambangkan kesetiaan yang teguh pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. (Rohimat & Hakim, 2020)

Dengan mensintesis keharusan moral dengan ajaran-ajaran sosialnya, agama, dalam lingkup teologi pembebasan, mengasumsikan peran yang lebih luas dalam menghadapi tantangan-tantangan global seperti kemiskinan. Dengan mandat yang

diperluas ini, agama muncul sebagai kekuatan yang kuat untuk persatuan, mengilhami individu-individu untuk bersatu dalam mengejar dunia yang ditandai dengan keadilan, kesetaraan, dan pelukan universal terhadap martabat manusia. Dalam perspektif teologi pembebasan, agama dianggap sebagai suara yang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Lebih dari sekadar menjadi panduan rohaniah, agama dipandang sebagai kekuatan moral yang memotivasi tindakan nyata dalam mengatasi ketidaksetaraan dan kezaliman sosial. Pendekatan ini meresapi agama dengan peran yang lebih proaktif dalam membentuk masyarakat yang adil dan setara. Agama sebagai suara hak asasi manusia memandang hak-hak dasar setiap individu sebagai fondasi yang tidak dapat dikompromikan. Prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang terdapat dalam ajaran agama diaktualisasikan melalui upaya untuk melawan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dalam masalah sosial dan ekonomi, agama diarahkan untuk mengambil peran tidak hanya sebagai penasihat moral, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif. Partisipasi agama dalam penanggulangan kemiskinan bukanlah semata-mata tanggung jawab sosial, melainkan juga sebuah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran agama tersebut. Agama tidak hanya mengajarkan tentang keberpihakan kepada kaum lemah dan terpinggirkan, tetapi juga mendorong umatnya untuk bertindak sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya agama dalam mengatasi kemiskinan dianggap sebagai sebuah bentuk pengabdian yang menggambarkan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Dengan menggabungkan aspek moral dan ajaran sosialnya, agama dalam pendekatan teologi pembebasan memiliki peran yang lebih menyeluruh dalam menghadapi tantangan-tantangan global seperti kemiskinan. Dengan merangkul peran ini, agama dapat menjadi kekuatan positif yang mendorong masyarakat untuk bersatu dalam menciptakan dunia yang lebih adil, setara, dan berlandaskan pada nilai-nilai universal kemanusiaan. (Nur & Shodiqin, 2022)

Agama Sebagai Agen Perubahan dan Pembela Mereka yang Terpinggirkan

Pemikiran teologi pembebasan muncul sebagai alat yang tidak hanya relevan tetapi juga esensial dalam membimbing agama untuk mengaktualisasikan misinya sebagai agen perubahan yang memperjuangkan hak mereka yang terpinggirkan dan menderita akibat kemiskinan. Dalam landasan konseptual teologi pembebasan, agama tidak hanya dilihat sebagai entitas rohaniah, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang memiliki tanggung jawab untuk bergerak dan berkontribusi secara aktif dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. (Alwi, n.d.)

Teologi pembebasan menawarkan pandangan holistik terhadap peran agama dalam masyarakat. Dengan menekankan hak asasi manusia dan keadilan sosial, pemikiran ini menegaskan bahwa agama seharusnya tidak hanya membatasi diri pada ritual dan peribadatan, tetapi juga terlibat dalam upaya nyata untuk mengentaskan penderitaan yang disebabkan oleh kemiskinan. Agama, dalam konteks ini, menjadi sebuah instrumen yang dapat memotivasi dan membentuk kesadaran sosial untuk melibatkan diri dalam perjuangan melawan ketidaksetaraan. Mengebrak lebih jauh, teologi pembebasan merujuk pada kebutuhan untuk mengubah struktur sosial dan ekonomi yang mendukung ketidaksetaraan. (*Menggali Kritik Terhadap Pemikiran Pembebasan Hasan Hanafi Oleh Sayyid Husain Nars – Muhammadiyah Corner (Muhcor) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, n.d.) Oleh karena itu, pemikiran ini mendorong agama untuk tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi juga untuk bersikap proaktif dalam merancang

dan mendukung kebijakan yang dapat menghasilkan perubahan sistemik. Dalam hal ini, agama diharapkan tidak hanya menjadi responsif terhadap penderitaan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan. Dengan mengadopsi pemikiran teologi pembebasan, agama dapat menegajawantahkan komitmennya untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berdaya. Ini mencakup peran aktif dalam mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, mengajak umatnya untuk berpartisipasi dalam upaya kolektif menuju keadilan sosial. Keseluruhan, pemikiran teologi pembebasan memberikan arahan dan motivasi yang jelas bagi agama untuk tidak hanya menjadi pengamat moral, tetapi juga agen perubahan yang berperan dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua.

Implikasi

Implikasi praktis dari pemikiran teologi pembebasan mencakup transformasi substansial dalam peran dan kontribusi agama dalam menanggulangi kemiskinan. Pertama-tama, agama diharapkan untuk aktif terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Ini berarti tidak hanya memberikan bantuan materi atau keuangan, tetapi juga memfasilitasi pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kapasitas lainnya yang dapat meningkatkan kemandirian individu dan kelompok yang rentan. Selanjutnya, agama diharapkan untuk menjadi agen perubahan sosial yang lebih aktif. Hal ini dapat mencakup advokasi untuk perubahan kebijakan yang mendukung kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia. Gereja, masjid, kuil, atau tempat ibadah lainnya dapat menjadi pusat koordinasi untuk memobilisasi masyarakat dalam aksi bersama untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan mengambil peran aktif dalam ranah sosial dan ekonomi, agama dapat menjadi katalisator bagi transformasi struktural yang diperlukan untuk mencapai masyarakat yang lebih adil. Selain itu, implikasi praktis juga melibatkan peningkatan peran agama dalam mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata. Agama dapat menjadi penengah dalam mengatasi disparitas ekonomi dengan mendorong prinsip keadilan dan solidaritas. Hal ini dapat mencakup pengembangan program-program ekonomi inklusif, serta pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan masyarakat. Selanjutnya, agama juga diharapkan untuk terus memberikan inspirasi dan motivasi bagi individu dan kelompok yang berkomitmen untuk memerangi kemiskinan. Pemimpin agama dapat menggunakan platform mereka untuk menyuarakan isu-isu kemiskinan, menggugah kesadaran masyarakat, dan membimbing umatnya dalam tindakan nyata. Secara keseluruhan, implikasi praktis dari pemikiran teologi pembebasan menuntut agar agama tidak hanya berbicara tentang keadilan dan kesetaraan, tetapi juga terlibat dalam tindakan konkrit yang membawa perubahan nyata. Dengan melibatkan agama secara aktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi. (Jati, n.d.)

Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Penulisan ini merangkum konsep teologi pembebasan dalam konteks agama secara menyeluruh, menekankan bahwa agama merupakan bagian integral dari pembangunan sosial, terutama dalam upaya mengatasi kemiskinan. Namun, untuk memahami pengaruh

teologi pembebasan secara lebih spesifik dalam suatu keyakinan agama, diperlukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan analisis teologis dari tokoh-tokoh yang mewakili teologi pembebasan dalam keyakinan agama tersebut. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang peran agama dalam mendukung negara dalam mewujudkan prinsip keadilan dan solidaritas dalam kehidupan bersama. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mendiskusikan secara terperinci pandangan individu atau untuk menyajikan argumen yang spesifik, melainkan untuk mengilhami dan mendorong pembaca untuk lebih mendalami pengaruh teologi pembebasan dalam konteks keyakinan agama yang berbeda.

Kesimpulan

Pemikiran teologi pembebasan, yang muncul pada abad ke-20, telah memberikan dorongan signifikan bagi peran agama dalam menanggulangi kemiskinan. Pendekatan ini membuka pintu bagi agama untuk tidak hanya berfungsi sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan progresif yang aktif berpartisipasi dalam perubahan sosial dan ekonomi. Pemikiran ini menyatakan bahwa agama memiliki tanggung jawab moral untuk membela hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan. Dengan mengadopsi perspektif teologi pembebasan, agama diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Sebagai kekuatan moral, agama diarahkan untuk menjadi agen perubahan yang mendorong masyarakat menuju tatanan yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu, upaya bersama agama untuk mengentaskan kemiskinan bukanlah sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga sebuah tindakan konkret yang mencerminkan komitmen mendalam untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Pentingnya peran agama dalam mengatasi kemiskinan tidak hanya terletak pada bantuan materi atau keuangan, tetapi juga pada pengaruh moralnya dalam membentuk nilai-nilai yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Pemikiran teologi pembebasan menekankan pentingnya agama sebagai kekuatan yang memimpin perubahan sosial secara positif, menciptakan visi bersama untuk masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Dalam menghadapi tantangan global seperti kemiskinan, agama dapat berperan sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan koordinasi bagi individu dan kelompok yang berkomitmen untuk memerangi ketidaksetaraan. Dengan demikian, pemikiran teologi pembebasan memberikan landasan konseptual yang kuat bagi agama untuk bergerak maju dalam menciptakan perubahan signifikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di dunia ini. (Hananti & Subandrijo, 2021)

Daftar Rujukan

- Adnan, A. A., & Bukido, R. (2020). Poverty And Religiosity: The 'Missing Link' From Islamic Perspective. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(2), 173.
<https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1149>
- Aljumanto, T. (n.d.). *BAZNAS RI Tetapkan Besaran Zakat Fitrah 2024 Rp 45 Ribu*. 20DETIK. Retrieved August 30, 2024, from

- <https://20.detik.com/detikupdate/20240401-240401093/baznas-ri-tetapkan-besaran-zakat-fitrah-2024-rp-45-ribu>
- Alwi, M. (n.d.). *Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Theologi Islam (S Th I) Jurusan Aqidah Filsafat Prodi Ilmu Aqidah pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*.
- Arifin, S., & Utomo, P. (2022). *Analisis Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia*. 2(1).
- Fitrianasari, R., & Badia'h, S. (2020). *Peran Lembaga Agama Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Hananti, V., & Subandrijo, B. (2021). *Miskin dan Kaya Dalam Injil Lukas dan Teologi Pembebasan*. 2.
- Indro, P. Y. N. (n.d.). *Kemiskinan Global Dalam Perspektif _Development as Freedom_ Amartya Sen Kasus: Indonesia*.
- Jati, W. R. (n.d.). *Agama dan Politik: Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama*.
- Karaniya Metta Sutta: *The Buddha's Words on Loving-Kindness*. (n.d.). Retrieved August 30, 2024, from <https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/snp/snp.1.08.amar.html>
- Kemenag. (n.d.). *Peranan Gereja dalam Mewujudkan Keadilan Sosial*. <https://kemenag.go.id>. Retrieved August 30, 2024, from <https://kemenag.go.id/kristen/peranan-gereja-dalam-mewujudkan-keadilan-sosial-3f37jd>
- Maulidah, F., & Soejoto, A. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 3(2), 227. <https://doi.org/10.26740/jepk.v3n2.p227-240>
- Menggali Kritik Terhadap Pemikiran Pembebasan Hasan Hanafi oleh Sayyid Husain Nars – Muhammadiyah Corner (Muhcor) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (n.d.). Retrieved April 18, 2024, from <https://muhcor.umy.ac.id/menggali-kritik-terhadap-pemikiran-pembebasan-hasan-hanafi-oleh-sayyid-husain-nars/>
- Ngabalin, M. (2017). Teologi Pembebasan Menurut Gustavo Gutierrez Dan Implikasinya Bagi Persoalan Kemiskinan. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 3(2), 129–147. <https://doi.org/10.37196/kenosis.v3i2.10>
- Nur, S. K., & Shodiqin, D. H. (2022). *Peran Nilai-Nilai Maqhasid Syariah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Pandemi Covid 19*. 1.
- OFM, W. (2022, March 27). Sekilas Tentang Teologi Pembebasan. *JPIC-OFM Indonesia*. <https://jpicoofmindonesia.org/2022/03/sekilas-tentang-teologi-pembebasan/>
- Rohimat, R., & Hakim, A. (2020). Teologi Pembebasan Dan Demokrasi Menurut Gus Dur. *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 4(1), 105–134. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9354>

- Rowland, C. (Ed.). (2007). *The Cambridge Companion to Liberation Theology* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CCOL0521868831>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Soegiharto, G. T. H. (2022). Agama dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *JURNAL TERUNA BHAKTI*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.47131/jtb.v4i2.111>
- Teologi Pembebasan, Mewujudkan Keadilan Sosial. (2020, May 29). *Kalimahsawa.ID*. <https://kalimahsawa.id/teologi-pembebasan-mewujudkan-keadilan-sosial/>
- Wahab, M. H. A. (2013). *Pemikiran Pembebasan Dalam Teologi (Suatu Analisis Historis dan Geografis)*. 15(2).